

MEMBACA KRITIS CRONY CAPITALISM VERSUS PURE CAPITALISM

Adnin Kaussar Fatir, Dzakwan Ramadhan A. P., Ihfadz Zefar Alfarizi,
Farih Rasyid, Muhammad Firdaus Haykal

STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

fatiradnin@gmail.com, dzakwanantonia@gmail.com, ihfadzefar@gmail.com,

farihrasyidtugas@gmail.com, namaguehaykal@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan hubungan antara kapitalisme murni dan kapitalisme kroni. Penulis menggunakan kajian pustaka dengan acuan bukunya Walter E. Block. Hasil dari artikel ini adalah pengetahuan mengenai perbedaan antara kapitalisme murni dan kapitalisme kroni secara mendalam.

Kata Kunci: Kapitalisme, Murni, Kroni.

ABSTRACT

This article explains the relationship between pure capitalism and crony capitalism. The author uses a literature review with a reference to his book Walter E. Block. The result of this article is an in-depth knowledge of the difference between pure capitalism and crony capitalism.

Keywords: Capitalism, Pure, Cronies.

PENDAHULUAN

Artikel *Crony Capitalism versus Pure Capitalism*, Walter E. Block membahas secara kritis hubungan antara kapitalisme murni dan kapitalisme kroni. Tulisan ini sebenarnya merupakan tanggapan terhadap artikel Michael Munger dan Mario Villarreal-Diaz yang berjudul *The Road to Crony Capitalism*. Block mengakui bahwa kapitalisme kroni merupakan ancaman nyata bagi kebebasan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Namun, ia tidak sepakat jika kronisme dianggap sebagai konsekuensi alami dari sistem kapitalisme itu sendiri.

Menurut Block, masalah utama bukan terletak pada kapitalisme pasar bebas, melainkan pada campur tangan negara yang membuka peluang bagi kolusi antara pengusaha dan pemerintah. Oleh karena itu, ia berusaha membedakan secara tegas antara kapitalisme murni (*pure capitalism*) dengan kapitalisme kroni (*crony capitalism*). Kapitalisme murni adalah sistem yang berpihak pada konsumen dan efisiensi pasar. Kronisme baru akan lahir ketika negara diberi kekuasaan untuk mengatur ekonomi. Oleh karena itu, membatasi atau bahkan menghilangkan campur tangan kekuasaan politik dalam pasar adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kebebasan ekonomi dan keadilan sosial.

Block selanjutnya menegaskan bahwa hubungan antara negara dan pelaku usaha menjadi titik krusial dalam membedakan kapitalisme murni dan kapitalisme kroni. Ketika pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan subsidi, proteksi, lisensi, konsesi, atau berbagai bentuk keistimewaan kepada perusahaan tertentu, maka mekanisme pasar berpotensi bergeser menjadi arena pertukaran kepentingan politik dan ekonomi. Dalam perspektif Block, keuntungan yang diperoleh melalui kedekatan dengan kekuasaan bukanlah hasil kompetisi pasar yang sehat, melainkan bentuk *rent seeking* yang merusak prinsip kebebasan ekonomi. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan bukan mengganti kapitalisme dengan sistem lain, tetapi mengembalikan pasar kepada prinsip *laissez-faire* dengan membatasi peran negara seminimal mungkin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian tidak menggunakan data lapangan, melainkan menganalisis gagasan dan argumentasi yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan tema *crony capitalism* dan *pure capitalism*. Sumber utama penelitian adalah karya Walter E. Block, khususnya artikel *Crony Capitalism versus Pure Capitalism*, yang menjadi pijakan utama dalam memahami konstruksi pemikiran Block mengenai hubungan antara mekanisme pasar, kebebasan ekonomi, dan campur tangan negara. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan kapitalisme, *crony capitalism*, *pure capitalism*, kebebasan pasar, serta hubungan antara negara dan aktivitas ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan gagasan-gagasan yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kritis dengan menghubungkan argumentasi Block dengan literatur pendukung yang telah dikaji. Tahap ini bertujuan untuk menemukan konsistensi, kekuatan argumentasi, keterbatasan, serta implikasi pemikiran Block dalam menjelaskan fenomena *crony capitalism*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pandangan Block, tetapi juga melakukan sintesis dan interpretasi terhadap gagasannya sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara kapitalisme, negara, dan praktik kronisme.

HASIL REVIEW

Hasil kajian menunjukkan bahwa Walter E. Block membangun pembedaan yang tegas antara *pure capitalism* dan *crony capitalism*. Menurut Block, kapitalisme murni bertumpu pada kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, kepemilikan privat, persaingan, dan mekanisme pasar yang tidak didistorsi oleh intervensi politik. Sebaliknya, kapitalisme kroni muncul ketika hubungan antara pengusaha dan pemerintah menghasilkan berbagai bentuk privilese, perlindungan, atau keuntungan tertentu yang tidak diperoleh melalui mekanisme persaingan pasar.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa **negara menjadi variabel penting dalam munculnya kapitalisme kroni menurut perspektif Block**. Semakin besar kewenangan negara dalam mengatur dan mengintervensi aktivitas ekonomi, semakin besar pula peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan kekuasaan politik demi memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, hubungan antara pemerintah dan pengusaha dapat berkembang menjadi kolusi dan *rent seeking*. Dengan demikian, kronisme dipahami bukan sebagai karakter bawaan kapitalisme pasar bebas, tetapi sebagai penyimpangan yang muncul akibat intervensi politik terhadap mekanisme pasar. Kajian juga menemukan bahwa Block menempatkan **kebebasan pasar sebagai mekanisme utama untuk mencegah kronisme**. Dalam pasar yang kompetitif, pelaku usaha memperoleh keuntungan melalui kemampuan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, bukan melalui kedekatan dengan penguasa. Oleh karena itu, pembatasan intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga persaingan dan mencegah pemberian hak istimewa kepada kelompok usaha tertentu.

Di sisi lain, hasil review menunjukkan adanya **perbedaan perspektif mengenai sumber munculnya kapitalisme kroni**. Block menolak pandangan bahwa kronisme merupakan konsekuensi inheren dari kapitalisme. Ia justru menempatkan intervensi negara sebagai penyebab utama yang memungkinkan terjadinya kronisme. Posisi ini berbeda dengan pandangan yang melihat bahwa struktur kapitalisme itu sendiri dapat menciptakan insentif bagi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan, sehingga hubungan antara pemilik modal dan negara berpotensi menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa perdebatan mengenai *crony capitalism* tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya campur tangan pemerintah, tetapi juga menyangkut **bagaimana hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik dibentuk dalam suatu sistem ekonomi**. Pemikiran Block memberikan penjelasan bahwa pasar bebas dan kapitalisme kroni merupakan dua kondisi yang harus dibedakan secara konseptual. Namun, perspektif tersebut sekaligus membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai apakah pengurangan intervensi negara semata-mata cukup untuk menghilangkan praktik kronisme dalam realitas ekonomi-politik.

Perbedaan Kapitalisme Murni dan Kapitalisme Kroni

Block menegaskan bahwa kapitalisme murni adalah sistem ekonomi yang berjalan berdasarkan kebebasan individu, hak milik pribadi, pertukaran sukarela, serta minim campur tangan negara. Dalam sistem ini, persaingan terjadi secara alami karena perusahaan harus memperoleh keuntungan melalui inovasi, efisiensi, dan kepuasan konsumen. Sebaliknya, kapitalisme kroni terjadi ketika pelaku bisnis memperoleh keuntungan bukan melalui persaingan sehat, melainkan melalui kedekatan dengan pemerintah. Bentuknya dapat berupa subsidi khusus, proteksi pasar, pembatasan pesaing, izin usaha yang diskriminatif, hingga kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Bagi Block, kapitalisme kroni bukanlah bentuk kapitalisme sejati. Ia justru melihat kronisme sebagai penyimpangan dari prinsip pasar bebas karena melibatkan penggunaan kekuasaan politik untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Kritik terhadap Pandangan Hayek dan Munger

Dalam pembahasannya, Block menyinggung pemikiran Friedrich Hayek, khususnya dalam buku *The Road to Serfdom*. Ia menganggap Hayek memang berhasil menunjukkan bahaya sosialisme dan intervensi negara, tetapi masih terlalu kompromistis terhadap beberapa bentuk campur tangan pemerintah, seperti kebijakan kesejahteraan dan pengendalian tertentu. Selain itu, Block juga mengkritik Munger dan Villarreal-Diaz yang menganggap bahwa kapitalisme secara alami akan berkembang menuju kronisme. Menurutnya, pandangan tersebut kurang tepat karena mengaburkan perbedaan antara pasar bebas dengan sistem ekonomi yang sudah dicampuri negara. Ia menilai bahwa jika negara memiliki kekuasaan untuk mengatur ekonomi, maka pelaku usaha akan selalu terdorong memanfaatkan kekuasaan tersebut demi kepentingan mereka. Dengan kata lain, akar masalahnya bukan pasar bebas, melainkan keberadaan kekuasaan politik yang dapat diperdagangkan.

Pandangan tentang Perusahaan Besar dan Kartel

Salah satu poin penting dalam tulisan Block adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa perusahaan besar selalu identik dengan kronisme. Menurutnya, ukuran perusahaan tidak bisa dijadikan ukuran apakah sebuah perusahaan bersifat eksploitatif atau tidak.

Perusahaan besar dapat tumbuh secara wajar apabila berhasil menciptakan efisiensi, memberikan harga lebih murah, meningkatkan kualitas produk, dan memenangkan persaingan secara sehat. Dalam kondisi seperti itu, pertumbuhan perusahaan justru dianggap sebagai hasil alami dari mekanisme pasar. Namun, jika perusahaan besar memperoleh kekuatan melalui perlindungan pemerintah, pembatasan pesaing, atau kebijakan anti-persaingan, maka di situlah muncul kapitalisme kroni. Konsentrasi pasar yang muncul karena efisiensi ekonomi. Konsentrasi pasar yang muncul karena privilese politik. Perbedaan ini menjadi salah satu inti penting dalam argumennya.

Kritik terhadap Konsep Rent-Seeking

Block juga memberikan kritik terhadap istilah rent-seeking. Walaupun ia setuju bahwa praktik mencari keuntungan melalui jalur politik merupakan tindakan yang merugikan, ia merasa istilah tersebut kurang tepat secara moral maupun konseptual. Menurutnya, kata “rent” dalam ekonomi sebenarnya bersifat netral, sehingga penggunaan istilah rent-seeking seolah-olah mengaburkan tindakan eksploitasi yang sebenarnya terjadi. Ia lebih memilih istilah yang secara langsung menggambarkan tindakan tersebut, seperti: *booty seeking*, *robbery seeking*, *predation seeking*, *exploitation seeking*. Pandangan ini menunjukkan bahwa Block tidak hanya membahas ekonomi secara teknis, tetapi juga melihat persoalan kronisme sebagai masalah moral dan politik.

Kritik terhadap Demokrasi dan Intervensi Negara

Block berpendapat bahwa demokrasi modern sering kali menjadi sarana berkembangnya kronisme. Dalam sistem demokrasi, politisi memiliki insentif untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu karena dapat memberikan keuntungan politik maupun ekonomi. Akibatnya, pemerintah cenderung: (1). memberikan perlindungan kepada perusahaan tertentu; (2). menciptakan regulasi yang menghambat pesaing; (3). serta memperbesar ketergantungan sektor bisnis terhadap negara. Ia bahkan menyatakan bahwa kapitalisme murni sulit terwujud selama negara masih memiliki kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi. Dalam pandangan Block, sistem yang benar-benar konsisten dengan kapitalisme murni adalah anarko-kapitalisme, yaitu sistem tanpa campur tangan negara sama sekali.

Kapitalisme, Persaingan, dan Kepentingan Konsumen

Block menolak pandangan bahwa pelaku bisnis selalu ingin menaikkan harga dan menurunkan kualitas produk. Menurutnya, tujuan utama perusahaan sebenarnya adalah memaksimalkan keuntungan, dan hal itu tidak selalu dilakukan dengan menaikkan harga. Dalam pasar bebas, perusahaan justru harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen. Terkadang perusahaan perlu meningkatkan kualitas, tetapi dalam kondisi lain mereka juga bisa menawarkan produk murah dengan kualitas lebih rendah karena memang ada konsumen yang membutuhkannya. Pandangan ini memperlihatkan bahwa mekanisme pasar dianggap lebih fleksibel dibandingkan sistem ekonomi yang dikendalikan negara.

Pandangan tentang Kriminalitas dan Kronisme

Salah satu argumen menarik dari Block adalah perbandingannya antara kriminalitas biasa dan kapitalisme kroni. Ia menilai bahwa tindakan seperti pencurian, perampokan, atau penipuan dapat ditekan karena ada hukum yang menghukumnya. Menurutnya, praktik kronisme juga seharusnya diperlakukan sama. Pengusaha yang meminta proteksi negara atau politisi yang menciptakan kebijakan demi kepentingan kelompok tertentu seharusnya dianggap melanggar prinsip keadilan ekonomi. Dengan demikian, Block melihat kronisme bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas.

Kelebihan dan Kekurangan Penelitian

Walter Block menjelaskan bahwa kapitalisme kroni bukan bagian dari pasar bebas, melainkan muncul karena adanya campur tangan negara dan kedekatan pengusaha dengan kekuasaan. Artikel ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan kritik terhadap pemikiran tokoh lain seperti Hayek, Stigler, dan Munger sehingga pembahasannya lebih luas dan analitis. Block menawarkan sudut pandang bahwa akar utama kronisme berasal dari kekuasaan politik dan regulasi pemerintah, bukan dari mekanisme pasar itu sendiri. Kekurangan Penelitian terlalu idealis terhadap pasar bebas. Penulis menganggap pasar dapat berjalan optimal tanpa campur tangan negara, padahal dalam praktiknya regulasi tetap dibutuhkan untuk menjaga persaingan yang sehat dan tidak mempertimbangkan realitas sejarah dan empiris.

Artikel ini kurang membahas fakta bahwa banyak negara maju justru berkembang melalui kebijakan negara seperti proteksionisme dan intervensi ekonomi. Beberapa pembahasan cenderung subjektif dan melebar. Ada bagian yang keluar dari fokus utama pembahasan kronisme, seperti kritik terhadap feminisme dan demokrasi, sehingga mengurangi objektivitas artikel.

Review Jurnal

Kritik Terhadap Definisi Kapitalisme Murni ala Block

Visi Walter Block mengenai kapitalisme murni memposisikan pasar bebas yang terlepas dari intervensi negara sebagai satu-satunya tatanan ekonomi yang valid secara moral dan ekonomi (Block, 2019). Landasan ontologis (dasar hakikat pemikiran) yang digunakan Block berakar pada Prinsip Non-Agresi (Non-Aggression Principle atau NAP, yaitu aturan moral yang melarang penggunaan kekerasan atau paksaan terhadap individu dan hak miliknya), di mana negara dikategorikan sebagai entitas kriminal inheren (entitas yang dari sananya sudah jahat) karena memungut pajak dan regulasi yang mendistorsi hak milik pribadi. Namun, konsepsi Block mengenai pasar spontan yang mengatur dirinya sendiri (self-regulating market) mengabaikan realitas sejarah institusional. Jika diuji melalui sosiologi sejarah, pasar modern bukanlah hasil evolusi alami, melainkan sebuah proyek politik yang dirancang dan dipaksakan secara sengaja oleh otoritas negara (Polanyi, 1944). Pembentukan komoditas fiktif seperti tenaga kerja, tanah, dan uang secara historis membutuhkan transformasi hukum yang agresif dan paksaan sistematis oleh negara, seperti yang terlihat pada pemberlakuan Poor Law Amendment Act 1834 di Inggris (undang-undang yang menghapus bantuan sosial tradisional agar masyarakat miskin terpaksa menjual tenaga kerjanya di pabrik). Tanpa struktur hukum yang dipaksakan oleh negara tersebut, pasar murni ala Block kehilangan jangkar eksistensinya dan rentan runtuh karena kehilangan fondasi politik yang membangunnya.

Lebih jauh lagi, gagasan anarko-kapitalisme (paham yang ingin menghapus negara dan menyerahkan segala urusan pada pasar bebas) Block yang mengusulkan privatisasi hukum melalui agen pertahanan swasta mengabaikan kebutuhan mendasar kapitalisme terhadap aspek "kalkulabilitas" (calculability, yaitu kemampuan pelaku usaha untuk menghitung risiko dan keuntungan secara pasti di masa depan). Kapitalisme modern memerlukan kepastian hukum rasional-legal dan penegakan kontrak yang impersonal

oleh birokrasi negara profesional, bukan sistem hukum arbiter (hukum yang berubah-ubah tergantung keputusan sepihak) (Weber, 1978). Privatisasi hukum yang ditawarkan Block justru memicu fragmentasi hukum dan anarki akibat ketiadaan monopoli penggunaan kekerasan yang sah, yang pada gilirannya mematikan kalkulasi ekonomi jangka panjang. Kelemahan empiris definisi Block juga dipertegas melalui fenomena "menendang tangga" (kicking away the ladder). Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat berhasil membangun kemakmuran kapitalistiknya melalui kebijakan intervensionis dan proteksionisme tarif yang agresif pada masa awal pertumbuhan industri mereka, bukan melalui pasar bebas sejak awal semenjak diklaim oleh Block (Chang, 2002).

Kritik Terhadap Penolakan Block Bahwa Kapitalisme Tidak Secara Alamiah Menghasilkan Kronisme

Block (2019) bersikeras bahwa kapitalisme kroni bukanlah distorsi internal dari mekanisme pasar, melainkan murni kegagalan politik yang disebabkan oleh keberadaan kekuasaan negara yang disewa oleh kelompok kepentingan. Penolakan Block terhadap kecenderungan alamiah pasar untuk menghasilkan kronisme bersifat utopis karena mengabaikan logika internal dari akumulasi kekuasaan modal itu sendiri. Berdasarkan analisis aksi kolektif, asumsi Block bahwa pasar bebas tanpa regulasi akan selalu kompetitif adalah keliru. Kelompok kecil yang memiliki kepentingan terpusat, seperti perusahaan besar atau kartel industri, secara rasional memiliki kapasitas organisasi yang jauh lebih unggul untuk melakukan aksi kolektif guna membangun hambatan masuk (barriers to entry) bagi pesaing baru dibandingkan kelompok besar yang kepentingannya tersebar seperti konsumen (Olson, 1965). Akibatnya, ketiadaan intervensi regulasi anti-monopoli negara tidak akan melahirkan persaingan sempurna, melainkan menghasilkan dominasi ekonomi oleh segelintir elit terorganisir yang membentuk "negara privat" yang opresif.

Kecenderungan mutasi internal ini juga diperkuat oleh argumen yang menunjukkan bahwa institusi ekstraktif tidak hanya dimonopoli oleh negara. Ketika otoritas pusat lemah atau dihilangkan seperti dalam proposal Block, elit ekonomi lokal di dalam pasar bebas secara alami akan membangun institusi ekstraktif mereka sendiri demi menekan persaingan dan mempertahankan status quo kekayaan (Acemoglu & Robinson, 2012). Logika ekonomi pasar bebas justru menyediakan insentif rasional bagi

aktor ekonomi terkuat untuk menjadi kroni. Ketika suatu korporasi mencapai skala raksasa, alokasi modal untuk aktivitas lobi politik dan pencarian rente (rent-seeking) menawarkan tingkat pengembalian (return) yang jauh lebih tinggi daripada investasi pada riset produk baru (Zingales, 2012). Dengan demikian, kronisme bukanlah anomali eksternal akibat intervensi negara, melainkan sifat laten yang digerakkan secara inheren oleh rasionalitas pasar itu sendiri ketika tidak ada otoritas publik yang menegakkan arena permainan yang adil.

Penerimaan Sebagian Terhadap Pembedaan Block Antara Konsentrasi Pasar dan Kapitalisme Kroni

Meskipun kerangka anarko-kapitalisme Block dinilai cacat secara historis dan institusional, pembedaan konseptual yang ia ajukan antara konsentrasi pasar akibat efisiensi murni (sukarela) dan kronisme akibat hak istimewa politik dapat diterima secara parsial (Block, 2019). Sektor swasta memang terbukti mampu bertumbuh besar melalui inovasi dan pemenuhan preferensi konsumen secara efisien. Namun, penerimaan parsial terhadap argumen Block ini harus dibatasi oleh analisis evolusi korporasi yang holistik. Meskipun konsentrasi pasar pada mulanya digerakkan oleh inovasi sukarela melalui "penghancuran kreatif" (creative destruction), perkembangan kapitalisme lanjut secara alami mendorong fungsi kewirausahaan tersebut ke arah birokratisasi internal korporasi yang kaku dan menghentikan dinamika persaingan pasar murni (Schumpeter, 1942).

Dalam kapitalisme lanjut, pasar kompetitif klasik yang diasumsikan oleh Block telah digantikan oleh "sistem perencanaan" (planning system) yang dikendalikan oleh technostructure korporasi raksasa (Galbraith, 1967). Korporasi besar tidak lagi sekadar merespons pasar secara pasif, melainkan aktif mengontrol lingkungan ekonomi mereka dan memanipulasi preferensi konsumen melalui manajemen permintaan atau iklan masif demi menjaga stabilitas otonomi korporasi. Akibatnya, kedaulatan konsumen yang diagungkan Block bergeser menjadi ilusi karena korporasi raksasa telah bertindak sebagai entitas kuasi-negara. Penerimaan terhadap pertumbuhan kekayaan sukarela juga runtuh jika menggunakan analisis mengenai akumulasi ketimpangan. Tanpa adanya mekanisme penyeimbang dari negara seperti pajak progresif dan layanan publik, ketimpangan ekstrem yang dihasilkan dari pasar murni akan bersifat kumulatif dan secara otomatis mengonversi kekayaan ekonomi menjadi kekuasaan politik privat

(Stiglitz, 2012). Elit kaya dapat mengontrol sumber daya vital dan mendanai keamanan swasta, yang pada akhirnya memicu regresi ke arah tatanan distopia feodal baru di mana hak individu tidak lagi setara melainkan ditentukan oleh kepemilikan kapital.

KESIMPULAN

Berdasarkan bedah artikel "Crony Capitalism versus Pure Capitalism", dapat disimpulkan bahwa Walter E. Block secara tegas menolak anggapan bahwa kapitalisme kroni adalah konsekuensi alami atau kelanjutan dari kapitalisme murni. Bagi Block, akar masalah dari kronisme bukanlah mekanisme pasar bebas atau ukuran sebuah perusahaan, melainkan adanya intervensi dan kekuasaan regulasi negara yang dapat "diperdagangkan" demi keuntungan politik dan bisnis sepihak. Secara garis besar, esensi pemikiran Block dalam artikel ini mencakup tiga poin utama: pemisahan yang tegas antara kapitalisme murni dan kapitalisme kroni, kritik terhadap Intervensi Negara & Demokrasi, dan redefinisi beberapa istilah, seperti: rent-seeking dan mengusulkan istilah yang lebih lugas seperti booty seeking atau exploitation seeking untuk menyamakan praktik kronisme dengan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat luas. Kapitalisme murni adalah sistem yang berpihak pada konsumen dan efisiensi pasar. Kronisme baru akan lahir ketika negara diberi kekuasaan untuk mengatur ekonomi. Oleh karena itu, membatasi atau bahkan menghilangkan campur tangan kekuasaan politik dalam pasar adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kebebasan ekonomi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Block, W. E. (2019). Crony capitalism versus pure capitalism. *Journal of Business Ethics and Market Studies*, 2(1), 1–12.
- Chang, H. J. (2002). *Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective*. Anthem Press.
- Galbraith, J. K. (1967). *The new industrial state*. Houghton Mifflin.
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Harvard University Press.
- Polanyi, K. (1944). *The great transformation*. Beacon Press.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.

Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality. W. W. Norton & Company.

Weber, M. (1978). Economy and society. University of California Press.

Zingales, L. (2012). A capitalism for the people: Recapturing the lost genius of American prosperity. Basic Books.